

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA MAKASSAR

KARLINA GHAZALAH RAHMAN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**KARLINA GHAZALAH RAHMAN
A31112284**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

KARLINA GHAZALAH RAHMAN
A31112284

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 16 Mei 2016

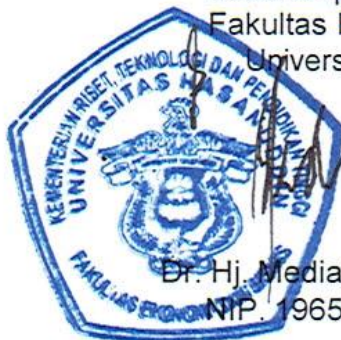
Pembimbing I

Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA
NIP. 19670319 199203 2 003

Pembimbing II

Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19650925 199002 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19650925 199002 2 001

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

KARLINA GHAZALAH RAHMAN
A31112284

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **21 April 2016** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., A.k., M.Soc., Sc., CA	Ketua	1. 
2.	Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., A.k., CA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Darwis, S.E., M.SA., A.k., CA	Anggota	3. 
4.	Dr. Syamsuddin, S.E., A.k., M.Si., CA	Anggota	4. 
5.	Muhammad Irdham Ferdiansah, S.E., M.Acc.	Anggota	5. 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., A.k., CA
NIP. 19650925 199002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Karlina Ghazalah Rahman
NIM : A31112284
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI KOTA MAKASSAR**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 16 Mei 2016

Yang membuat pernyataan,



Karlina Ghazalah Rahman

PRAKATA



Puji Syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, kekuatan, dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar”.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak yang turut membantu selama penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. atas segala berkah, nikmat, kemudahan, dan kelancaran yang senantiasa diberikan kepada peneliti.
2. Orang tua peneliti, Ayahanda tercinta Prof. Dr. H. Abdul Rahman Mus, S.E., M.Si., dan Ibunda tercinta Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H., terima kasih atas semua bantuan, doa dan arahan yang diberikan kepada adinda selama proses penyusunan skripsi ini, serta adik tercinta Moch. Ridho Ghazalah Rahman dan Ratu Maharani Ghazalah Rahman yang selalu memberikan *support* dan semangat kepada peneliti.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., M.Si., Ak., CA, Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Hj. Sitti Haerani, S.E., M.Si., Wakil Dekan II Ibu Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA, dan Wakil Dekan III Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmatiah, S.E., MA.
4. Ketua Departemen Akuntansi, Ibu Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak, CA, dan Sekretaris Departemen Akuntansi Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak., CA.

5. Pembimbing Peneliti, Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., A.k., M.Soc.,Sc.,CA, selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., A.k., CA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Penguji Bapak Dr. Darwis Said, S.E., M.SA., Ak., CA, Bapak Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA, dan Bapak Muhammad Irdam Ferdiansah., S.E., M.Acc., yang telah memberikan saran dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA, selaku Penasihat Akademik peneliti
8. Segenap pimpinan SKPD beserta jajarannya yang berada dalam pemerintah Kota Makassar di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kelautan dan Kehutanan, Dinas Pendapatan, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Bontoala, dsb yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada peneliti selama melakukan peneliti
9. Bapak dan Ibu pegawai lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Pak Aso, Pak Ical, Pak Asmari, Ibu Farida, Pak Safar, dan lainnya yang tidak saya sebutkan namanya disini.
10. Sahabat “Keluarga Kecil” saya Nue, Tipun, Kak Budi, Ilmi, dan Gieze yang senantiasa memberikan saya *support* selama melakukan penelitian.
11. Kakak-Kakak Tercinta saya Kak Ansul, Kak Astri, Kak Puthe, Kak Nunu, Kak Ayu dan Sahabat saya Zashya, Titin, Ulfa, Widya, Javany dan Fira yang selalu mengajarkan saya arti belajar dan pengalaman.
12. Teman-teman Akuntansi 2012 “PE12ENNIAL” Amir, Idham, Mamat, Kak Sandy, Daly, Faiz, Rizal, Chaidir, Kak Retno, Ida, Anti, Ria, Hilda, Ii, Sugi, Dillah, Lita, Amel, Sufe, Fandi, Michael, Thaibi, Fadel, Kak Arya, Fadli, dan semua yang namanya tidak disebutkan satu per satu serta kakak dan adik yang selalu membantu saya di kampus Kak Ian, Kak Iyung, Kak Jerry, Kak Nona, Kak Agung, Kak Asti, Kak Thariq, Kak Zaki, Kak Hardi, Kak Uci, Kak

Chibi, Kak Fahmi, Kak Man, Kak Aiman, Kak Wawan, Dwiko, Chan, Ausi, Jul, Made, Theo, Tio, Dini, Ima, Sari, Ratih, Ulan, Fina, Icha, Kiki, Feny, Abi, Icha Asbabun, Aan, Nia, Rafif, Anggi, Icha Ibrahim, Yayat, Opik, Rizal, Fatri, Fadil, Farid, dan semua yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu. Kalian yang terbaik.

13. Teman-teman seperjuangan dakwah Forum Studi Ekonomi Islam (FoSEI) Rahmat, Diah, Kak Yuyun, Eka, Ira, Nurul, Ana, Iqrima, Putri, Sofi, Yasin, Kadafi, dan semua yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu terima kasih atas pelajaran dan pengalamannya demi dakwah ekonomi syariah yang lebih maju.
14. Sahabat saya di luar pulau Sulawesi Nina, Febri, Mas Rangga, Mba Elis, dan Mba Siti semoga kita bisa bertemu lagi dimanapun dan kapanpun kesuksesan menunggu.
15. Senior dan Junior di Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin khususnya panitia dan *steering committee 7th, 8th, dan 9th Hasanuddin Accounting Days*, terima kasih atas pengalaman, kerja sama, dan ilmu yang telah diberikan.
16. Teman-teman KKN Tematik Makassar Universitas Hasanuddin Gelombang 90 Kelurahan Maccini Sombala Kak Janu, Kak Hasim, Fiqhi, Winny, dan Hawa.
17. Serta terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dan semoga segala kebaikan diterima sebagai ibadah disisi-Nya.

Akhirnya, Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Meski demikian, peneliti sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Olehnya, kritik dan saran dari pembaca menjadi harapan peneliti.

Makassar, Mei 2016

Peneliti

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA MAKASSAR

THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE AND INTERNAL CONTROL TO LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT PERFORMANCE OF MAKASSAR CITY

Karlina Ghazalah Rahman
Ratna Ayu Damayanti
Mediaty

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *good governance* yang meliputi prinsip *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectivity and efficiency, accountability*, dan *strategic vision* dan pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Makassar. Data penelitian diperoleh dari observasi dan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan software SPSS. Hasil pengujian analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Makassar. Kinerja pengelolaan keuangan Kota Makassar dipengaruhi oleh penerapan *good governance* dan pengendalian internal sebesar 58,17% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata kunci: *Good Governance, Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengendalian Internal*

The aim of this research is to analyze the effect of implementation of good governance which include the principle of participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectivity and efficiency, accountability, and strategic vision also internal control which include internal environment, risk assesment, internal activity, information and communication, and evaluating internal control to local government financial management performance of Makassar City. Data in this research were obtained from observation and questionnaires that distributed to respondents. Multiple Linier Regression formula was used in this study with SPSS software. The test result of multiple linier regression indicated that the implementation of good governance and internal control positively effect the local government financial management performance of Makasssar City. The financial management performance of Makassar City is influenced by the implementation of good governance and internal control by 58,17% and the rest influenced by other factors.

Keywords: *Good Governance, Local Government Financial Management Performance, Internal Control*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 13
2.1 Tinjauan Teori	13
2.1.1 Teori Atribusi	13
2.1.2 <i>Good Governance</i>	14
2.1.2.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	15
2.1.2.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	17
2.1.3 Pengendalian Internal	19
2.1.3.1 Pengertian Pengendalian Internal	19
2.1.3.2 Unsur-Unsur Pengendalian Internal.....	20
2.1.3.3 Tujuan Pengendalian Internal.	21
2.1.4 Kinerja	22
2.1.4.1 Pengertian Kinerja.	22
2.1.4.2 Pengertian Kinerja Keuangan.	23
2.1.4.3 Pengertian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.	23
2.1.5 Pengukuran Kinerja	25
2.1.5.1 Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik.	26
2.1.5.2 Konsep <i>Value for Money</i>	27
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
2.4 Hipotesis.....	30
 BAB III METODE PENELITIAN	 34
3.1 Rancangan Penelitian	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3 Populasi dan Sampel.....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	35

3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	37
3.6.1 Variabel Penelitian.....	37
3.6.2 Definisi Operasional.....	37
3.7 Metode Analisis Data.....	43
3.8 Pengujian Kualitas Data.....	43
3.8.1 Uji Validitas	44
3.8.2 Uji Reliabilitas.....	44
3.9 Uji Asumsi Klasik.....	44
3.9.1 Uji Normalitas Data.	45
3.9.2 Uji Autokorelasi.	45
3.9.3 Uji Heteroskedastisitas	46
3.9.4 Uji Multikolinearitas	46
3.10 Pengujian Hipotesis.....	47
3.10.1 Uji F.....	47
3.10.2 Uji T.....	47
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 48
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar.	48
4.1.1 Geografi, Topografi, dan Demografi.	48
4.1.2 Organisasi.....	49
4.2 Analisis Data.	52
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	52
4.2.1.1 Statistik Deskriptif Variabel <i>Good Governance</i>	53
4.2.1.2 Statistik Deskriptif Variabel Pengendalian Internal	56
4.2.1.3 Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan	57
4.2.2 Uji Kualitas Data.....	58
4.2.2.1 Uji Validitas	58
4.2.2.2 Uji Reliabilitas	60
4.2.3 Analisis Korelasi dan Analisis Regresi.....	61
4.2.3.1 Korelasi <i>Good Governance</i> , Pengendalian Internal, dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Secara Parsial	62
4.2.3.2 Korelasi <i>Good Governance</i> , Pengendalian Internal, dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Secara Simultan	63
4.2.4 Analisis Uji Asumsi Klasik.....	65
4.2.4.1 Uji Normalitas	65
4.2.4.2 Uji Autokorelasi.....	67
4.2.4.3 Uji Multikolinieritas	68
4.2.4.4 Uji Heteroskedastisitas	69
4.2.5 Analisis Uji Hipotesis.	70
4.2.5.1 Uji F.....	70
4.2.5.2 Uji T.....	72
4.2.6 Ikhtisar Persamaan Regresi	73
4.2.7 Pembahasan	75
4.2.7.1 Penerapan <i>Good Governance</i> terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar	75

4.2.7.2 Penerapan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar	78
4.2.7.3 Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar	80
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran.....	84
5.3 Keterbatasan Penelitian	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Skala Penilaian Untuk Pernyataan Positif	36
4.1 Daftar Organisasi Pemerintah Kota Makassar	50
4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (X1).....	53
4.3 Statistik Deskriptif Variabel Pengendalian Internal (X2)	56
4.4 Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)	58
4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan <i>Good Governance</i>	59
4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Internal	59
4.7 Hasil Uji Validitas Kinerja Pengelolaan Keuangan	60
4.8 Hasil Uji Reliabilitas	61
4.9 Hasil Korelasi Variabel Independen terhadap Variabel Dependen	62
4.10 Analisis Korelasi Simultan <i>Good Governance</i> , Pengendalian Internal dan Kinerja Pengelolaan Keuangan.....	64
4.11 Klasifikasi Koefisien Korelasi Pearson	64
4.12 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov.....	67
4.13 Hasil Uji Autokorelasi	68
4.14 Hasil Uji Multikolinieritas	69
4.15 Hasil Uji Simultan (Uji f)	71
4.16 Hasil Uji Parsial (Uji t)	72
4.17 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel <i>Good Governance</i>	75
4.18 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Pengendalian Internal	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Rerangka pemikiran	30
4.1 Grafik Normalitas P-Plot	66
4.2 Uji Heteroskedastisitas	70
4.3 Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 Uji F	73
4.4 Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 Uji T	73
4.5 Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 Uji T	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata.....	90
2	Kuesioner Penelitian	91
3	Hasil Uji Validitas (Output SPSS)	98
4	Hasil Korelasi (Output SPSS).....	104
5	Hasil Uji Normalitas.....	105
6	Hasil Uji Autokorelasi, Multikolenieritas, Heteroskedastisitas	106
7	Hasil Jawaban Responden.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 oleh Pemerintah, mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah memberikan implikasi bahwa tuntutan otonomi daerah harus lebih luas dan kewenangan yang diberikan lebih besar kepada Pemerintah Daerah (Halim, 2001). Selanjutnya undang-undang ini diganti dan disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD. Lalu adanya perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terbaru adalah UU No. 23 Tahun 2014.

Lahirnya otonomi daerah menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang semula adalah sentralisasi lalu menjadi desentralisasi. Pada era otonomi daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber – sumber keuangan untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan dari otonomi daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, sehingga dalam hal mengatasi permasalahan daerah, wewenang otonomi daerah sangat diprioritaskan.

Menurut Mardiasmo (2002), beberapa misi yang terkandung dalam sistem otonomi daerah adalah : pertama, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, kedua meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, ketiga memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah. Adanya otonomi daerah memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola dan melakukan pembaruan sistem keuangan daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah bisa menjadi lebih baik dan berorientasi sektor publik.

Diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan pemerintahan daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna menciptakan pemerintahan yang berasaskan otonomi daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, peningkatan, pemberdayaan, dan adanya peran serta masyarakat juga peningkatan dari segi efektivitas dan efisiensi daya saing daerah.

Permasalahan dalam sektor publik sangat beragam dan sangat dielukan banyak masyarakat terutama soal pelayanan publik. Masyarakat mengharapkan bahwa pelayanan yang baik akan membawakan dampak yang baik pula untuk kesejahteraan mereka. Untuk menciptakan pelayanan publik yang baik maka suatu organisasi harus dapat menciptakan budaya organisasi yang baik, tegas, teratur, dan dapat dipercaya. Namun kondisi ini sering didapati sebagai tonggak permasalahan di setiap organisasi *nonprofit* atau di dalam sebuah negara dikatakan pemerintahan daerah. Aparatur pemerintahan daerah sering menghianati kepercayaan publik melalui kinerja mereka yang tidak bagus atau tidak memuaskan. Pengaruh kepentingan adalah salah satu budaya yang sering didapati para aparatur pemerintahan daerah. Kepentingan ini beragam seperti

adanya kepentingan politik, bekerja di luar kewenangan, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan adanya pemborosan dana oleh oknum tertentu.

Pandangan masyarakat terhadap pemerintah saat ini sangat menentukan stigma yang dibangun guna mendukung kinerja pemerintahan daerah. Krisis kepercayaan masyarakat terkait kinerja PEMDA dinilai dapat mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Demi mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik maka pemerintah harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan tegas atau dikenal dengan istilah *good governance*. Tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pola – pola lama penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat saat ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik harus direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan–perubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Good Governance adalah sistem tata kelola pemerintahan yang baik dinilai dari beberapa indikator tertentu. Umumnya indikator yang sering dinilai dalam kinerja pemerintahan adalah *transparency*, *accountability*, *responsiveness*, *effectiveness* dan *efficiency*, dan *participation*. Bukan hanya pemerintahan saja yang dapat menggunakan konsep ini, entitas perusahaan juga dapat menggunakannya. *Good governance* memiliki peran dalam pengambilan keputusan (*decision maker*) guna melakukan kegiatan di masa yang akan datang.

Munculnya konsep *good governance* ini adalah akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akurat. Penerapan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap dengan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan untuk menerapkan *good governance* adalah melalui pelayanan publik.

Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Para pejabat publik, masyarakat, dan dunia usaha memiliki peran bersama dalam perbaikan kinerja pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik sangat penting guna mewujudkan tingkat kepuasan kerja dan kepercayaan masyarakat. Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan hadirnya pemberian pelayanan publik bukan untuk memaksimalkan laba (*profit-oriented*) (Bastian, 2006), melainkan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002) terdapat 3 fungsi utama sektor publik : (1) melakukan pelayanan publik yang sangat vital bagi kepentingan umum (2) mendefinisikan prinsip operasional masyarakat (3) menyediakan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang ingin menanganinya.

Pelayanan publik sangat identik dengan kinerja yang dilakukan para pegawai pemerintahan daerah. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa

diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Realisasi yang terlihat dilapangan bahwa kinerja menjadi indikator penting suatu pemerintahan itu bisa dikatakan mampu atau tidak dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Salah satu kinerja yang penting dalam mendukung pelayanan publik tersebut adalah kinerja keuangan.

Kinerja keuangan adalah kegiatan atau aktifitas yang dilakukan pegawai yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Kinerja keuangan dibagi atas dua bagian aktifitas yaitu pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan. Pelaporan keuangan berhubungan dengan informasi-informasi keuangan yang telah dan akan digunakan untuk mendukung para entitas dalam pengambilan keputusan yang akan datang. Sedangkan pengelolaan keuangan berhubungan dengan aktifitas mengatur dan mengelola jalannya transaksi keuangan seperti aset guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabilitas dan transparansi.

Hambatan yang sering muncul menyangkut kinerja pengelolaan keuangan adalah kurangnya pemahaman terkait tata cara penyusunan anggaran yang baik dan benar. Penyusunan anggaran yang baik adalah yang sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Fungsi dari adanya penyusunan anggaran untuk menjaga tingkat pemakaian dana sehingga dapat meminimalisir pemborosan dana yang tidak diperlukan dalam pemerintah daerah. Hasil dari adanya penyusunan anggaran ini adalah laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dimana akan memberikan opini yang memiliki pengaruh dalam berbagai entitas. Kelalaian dalam penyusunan

anggaran dapat menyebabkan daerah justru memiliki opini yang kurang baik. Jadi sudah sewajarnya jika pemerintah daerah harus mengetahui cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar lewat penyusunan anggaran.

Dalam rangka menjalankan amanat rakyat, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Untuk mewujudkannya, diperlukan pendekatan prestasi kerja dalam penyusunan APBN/APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Hal ini menjadi bagian dalam perwujudan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik.

Selain *good governance*, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja organisasi khususnya publik adalah pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan kebijakan–kebijakan, prosedur–prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset–aset perusahaan dari kerugian atau korupsi dan untuk memelihara keakuratan data keuangan (Dasaratha dan Frederick, 2011). Sistem pengendalian internal dilaksanakan menyeluruh di lingkungan organisasi publik baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan pengendalian internal adalah memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Kewajiban tentang penyelenggaraan pengendalian internal di masing–masing organisasi dan entitas pelaporan juga dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008 yang secara eksplisit mengatur apa yang dinamakan dengan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP) yang secara konsep banyak mengacu kepada definisi pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organization (COSO)*.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian mengenai *good governance* dan pengendalian internal sebelumnya diteliti oleh Pratolo (2006) yang meneliti mengenai pengendalian intern, komitmen organisasi terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* menemukan bahwa lemahnya pengendalian manajemen akan berpengaruh secara kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan kinerja. Sedangkan menurut Lucy dkk (2013) yang meneliti tentang analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah mendapatkan hasil bahwan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kedua penelitian ini memiliki persamaan indikator variabel dengan peneliti dan hasil penelitian yang serupa, namun subjek dan objek penelitian yang digunakan berbeda. Penelitian ini menjadi penting karena subjek dan objek yang akan diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Soleman (2007) yang meneliti tentang kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Trisnaningsih (2007) juga meneliti tentang independensi auditor dan

komitmen organisasi sebagai mediasi pengaruh pemahaman *good governance*, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor, hasil penelitiannya juga menunjukkan pemahaman *good governance* tidak berpengaruh langsung, kemudian untuk gaya kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja auditor.

Juli (2009) meneliti tentang pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* terhadap efektivitas kerja pegawai kantor Dinas Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara dikategorikan baik. Efektivitas kerja pegawai di Dinas Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara dikategorikan baik/efektif. Hal ini juga masih perlu ditingkatkan dengan pendidikan dan latihan dengan terlebih dahulu melakukan penelitian prestasi kerja pegawai.

Juliana (2013) meneliti tentang pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Hasil yang didapatkan adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan *good governance* dengan kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Apriani (2015) meneliti tentang pengaruh *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja organisasi dilihat dari persepsi pegawai (studi kasus pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman). Hasil penelitian ini adalah *good governance* dan pengendalian internal mempengaruhi kinerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.

Nugraha (2015) telah meneliti pengaruh penerapan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan hasil bahwa penerapan *good governance* berpengaruh secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Kinerja pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh penerapan *good governance* sebesar 70,9% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Pada dasarnya penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Lucy dkk (2013) yang meneliti tentang analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, dan Nugraha (2015) yang meneliti pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan Lucy dkk (2013) dan Nugraha (2015) adalah penelitian ini menggunakan seluruh indikator yang ada di dalam *good governance* dan ruang lingkup kinerja yang digunakan adalah khusus yaitu kinerja pengelolaan keuangan, dikarenakan dua indikator saja tidak menjamin bahwa *good governance* dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, serta peneliti menambah satu variabel yaitu pengendalian internal untuk mengukur sejauh mana faktor internal dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan di pemerintah daerah, variabel ini ditambahkan karena melihat penelitian yang dilakukan Pratolo (2006) memiliki hasil yang berbeda. Kemudian yang membedakan juga adalah responden yang dipakai meliputi Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) di Kota Makassar.

Penelitian ini juga menggunakan analisis jalur (*path analysis*) sebagai metode analisis data. Metode ini digunakan untuk mengurai sejauh mana pengaruh tiap indikator baik dari variabel *good governance* maupun pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah.

Adanya berbagai penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda-beda ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *good governance* dan pengendalian internal. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul yaitu **“Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar ?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar ?
3. Apakah *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pengaruh *good governance* terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar
2. Untuk mengetahui tingkat pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar

3. Untuk mengetahui tingkat pengaruh *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pengembangan keilmuan di bidang akuntansi dapat terus ditingkatkan, terutama dalam membuktikan teori-teori yang melandasi penelitian, yaitu penilaian kinerja sektor publik khususnya pemerintah daerah dengan menciptakan tata kelolaan pemerintahan (*good governance*) dan pengendalian internal yang tercipta dengan baik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dengan menerapkan *good governance* dan pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan tambahan bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam segala pengambilan kebijakan publik baik pelaksanaan maupun pengawasannya.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan akuntansi sektor publik khususnya mengenai penilaian kinerja pemerintah daerah serta

menjadi perbandingan antara teori–teori yang telah didapatkan dalam perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan referensi yang berguna bagi lembaga pendidikan tempat peneliti belajar dan beberapa tenaga pendidik lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikir, dan hipotesis

BAB III Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan gambaran umum organisasi, hasil uji kualitas data, hasil uji signifikansi koefisien, hasil uji hipotesis yaitu uji t dan uji f, hasil uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Teori atribusi akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menentukan penyebab atau motif perilaku seseorang. Robbins (2006:172) mengemukakan teori atribusi adalah perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal adalah pemicu yang berada di bawah kendali pribadi individu itu, sementara faktor eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu individu dipandang terpaksa berperilaku demikian karena situasi. Ikhsan dan Ishak (2008) menjelaskan bahwa teori atribusi mempelajari tentang bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor disposisional (faktor dalam/internal), atautkah disebabkan oleh keadaan eksternal (Luthans, 2005).

Teori atribusi membahas mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan suatu hal terjadi, apakah hal tersebut terjadi karena faktor internal atau eksternal. Pada penelitian ini teori atribusi digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh *good governance* sebagai faktor eksternal yaitu *accountability, transparency, participation, rule of law, effectiveness and efficiency, responsiveness, equity, consencus orientation*, dan *strategic vision* juga pengendalian internal sebagai faktor internal dapat mempengaruhi kinerja pegawai khususnya dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori atribusi dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah khususnya dilihat pada indikator *good governance* dan pengendalian internal.

2.1.2 Good Governance

Istilah *good governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.

World Bank dalam Mardiasmo (2009:17) memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sedangkan *United Nation Development Programme (UNDP)* mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Seiring dengan perjalanan waktu, konsep *good governance* diarahkan pada proses multiarah yang sebelumnya setelah tahun 1990-an pun masih pada konsep yang lama hanya terpaku pada pemerintah, namun saat ini konsep

tersebut bersifat multiarah artinya tidak sebatas pada pemerintah namun juga di luar dari pemerintah itu sendiri (masyarakat dan swasta).

Kesimpulan dari *governance* tidak sekedar pemerintah atau pemerintahan yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan namun lebih dari itu bagaimana kekuasaan dan kewenangan ini harus bersinergi dan berinteraksi dengan aktor di luar dari pemerintahan. Artinya bagaimana pemerintah mampu menjadi fasilitator demi kepentingan aktor-aktor tersebut dengan membuat kebijakan dan lain sebagainya.

2.1.2.1 Pengertian *Good Governance*

Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. *Good governance* dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih dalam, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Mardiasmo, 2009).

Di sisi lain, menurut Batubara (2006) *good governance* dalam konteks ekonomi daerah merupakan bahasa strategi. Hal dikarenakan adanya relevansi dengan berkembangnya operasionalisasi manajemen dan administrasi publik, selaras dengan berbagai perubahan kemasyarakatan, baik pada skala domestik maupun skala internasional. Dalam *good governance* peran serta aktif masyarakat sangat mendominasi pembangunan.

Di sisi lain, Lembaga Administrasi Negara (2000:6) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Mills dan Seregeldin dalam Santosa (2008:130) mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan Mas'ood dalam Santosa (2008:55) menegaskan bahwa *good governance* adalah cita-cita yang menjadi visi setiap penyelenggara negara, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan dengan sistem administrasi yang bertanggung jawab kepada publik. Rochman dalam Widodo (2001:18) menegaskan bahwa dalam konsep *good governance* tidak sekedar melibatkan pemerintah tetapi juga berbagai aktor di luar pemerintah.

Jelas bahwa *good governance* adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu *governance* lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, *rule of law*, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. *Good governance* sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) *good governance* tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.

2.1.2.2 Prinsip – Prinsip *Good Governance*

UNDP dalam Supriadi (2012) sebagaimana Asian Development Bank (1999) merekomendasikan beberapa karakteristik *governance*, yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (*financial*), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.

Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:18) adalah sebagai berikut:

a. *Participation.*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

b. *Rules of law*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

c. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh

oleh mereka yang membutuhkan.

d. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga dan proses harus ditujukan untuk melayani *stakeholders*.

e. *Consensus orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

f. *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

g. *Efficiency and Effectiveness*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

h. *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

i. *Strategic vision*

Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi ke depan.

Sedangkan *Asian Development Bank* dalam Krina (2003) menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 (empat) pilar, yaitu (1) *accountability*, (2) *transparency*, (3) *predictability*, (4) *participation*. Dari berbagai pendapat mengenai prinsip-prinsip dan karakteristik *good governance* tersebut di atas, ternyata jumlah komponen prinsip-prinsip *good governance* sangat bervariasi. Namun demikian, prinsip-prinsip tersebut tidaklah berdiri sendiri, tapi saling berkaitan dalam satu kesatuan hubungan yang erat, sehingga masing-masing prinsip menjadi instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya

2.1.3 Pengendalian Internal

2.1.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Terselenggaranya *good governance* tidak terlepas dari peran pengendalian internal. Pengendalian internal perlu dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan berlangsung dengan lancar. Hal ini mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan tidak hanya sekedar dibuat saja, tetapi harus bisa menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada. Pihak kepala dinas perlu memikirkan secara matang perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kualitas pengendalian internal yang baik akan mendorong peningkatan kinerja organisasi daerah khususnya pengelolaan keuangan daerah.

The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) pada tahun 1949 termuat dalam jurnal yang dimuat oleh Simangunsong (2014: 51), mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai berikut:

“internal control comprise the plan of organization and all of coordinate methofs and measures adopted with a business to safeguard its assets, chek accucacy and reliability of accounting data, promote operational efficiency and encourage to prescribed managerial policies”.

Dasar pemikiran mengenai pengendalian internal telah disusun dalam suatu rerangka dasar pengendalian internal COSO (*COSO Intenal Control Framework*). Sistem pengendalian menurut *the Commitee of Sponsoring Organization* (COSO) (2003;373) didefinisikan sebagai berikut:

“internal control is broadly defined as process, effected by an entity’s board of director, management, and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectiveness of operation in following categories: (1) effectiviness and efficiency of operaion; (2) reability of financial reporting; (3) compliance with applicable law and regulation”.

Indonesia memiliki peraturan pemerintah mengenai pengendalian internal. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). PP ini adalah penjabaran pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Menurut PP No. 60 tahun 2008, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.3.2 Unsur – Unsur Pengendalian Internal

Unsur–unsur pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah

a. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintahan wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerja.

b. Penilaian risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Adapun penilaian risiko yang dimaksud meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko.

c. Kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

d. Informasi dan komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

e. Pemantauan pengendalian internal

Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

2.1.3.3 Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal menurut *Comittee of Sponsoring Organization of the Treadway Comission* dimuat oleh Ningsih (2013: 1), merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan sebagai berikut;

a. Keandalan pelaporan keuangan;

Pengendalian internal yang ada membuat manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan untuk pihak internal maupun eksternal organisasi.

b. Kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku;

Pengendalian internal ini bertujuan agar organisasi melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

- c. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan.

Pengendalian internal dalam suatu organisasi dapat menjadi instrumen agar pengguna sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam operasi perusahaan.

Menurut Mulyadi (2002: 178), tujuan dari pengendalian internal terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Menjaga kekayaan perusahaan
 - 1) Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan,
 - 2) Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya.
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
 - 1) Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan,
 - 2) Pencatatan transaksi yang terjadi tercatat dengan benar di dalam catatan akuntansi perusahaan.

Menurut Mardi (2011: 59), tujuan pengendalian internal sebagai berikut:

- a. Menjaga keamanan harta milik perusahaan.
- b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi.
- c. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
- d. Membantu menjaga kebijakan manajemen yang telah ditetapkan

2.1.4 Kinerja

2.1.4.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Bastian, 2006:274). Lebih lanjut, di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu pencapaian hasil atas kegiatan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan.

2.1.4.2 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efektifitas terjadi apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal.

2.1.4.3 Pengertian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan,

pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Domai, 2002).

Sejalan dengan pengertian tersebut di atas Halim (2001) mengatakan, membicarakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah: oleh karena itu anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka selama satu tahun anggaran. Tuntutan mengenai otonomi daerah dan pemerintahan yang demokrasi di daerah sebagai konsekuensi dan implikasi globalisasi. Otonomi selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonomi jika ia menentukan diri sendiri, membuat aturan (hukum) sendiri, mengatur diri sendiri, dan berjuang berdasarkan kewenangan kekuasaan dan prakasa sendiri (Suryadi, 2000) dalam (Rohman, 2009).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia, sebagai konsekuensinya adalah perlu dilakukan penataan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sebagai manifestasi dari otonomi daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Syamsi dalam Errni Tjan, 2014).

Secara umum kinerja pengelolaan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengelola aset daerah dalam bentuk pencatatan transaksi yang telah dilakukan selama tahun berjalan dan dirumuskan dalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya. Pengelolaan keuangan yang baik adalah sesuai dengan aturan dan standar yang sudah ada.

2.1.5 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002). Sementara menurut Gazperz (2002), pengukuran kinerja merupakan suatu cara memantau dan menelusuri kemajuan tujuan-tujuan strategis. Hasil pengukuran dapat berupa indikator awal menuju akhir atau indikator hasil akhir. Whittaker (dalam BPKP, 2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Simons (dalam BPKP, 2000) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan,

sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

2.1.5.1 Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja sangat dibutuhkan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo (2009:121) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja dapat diperkuat dengan menetapkan *reward* dan *punishment system*.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi pelanggan.

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat *intangible* output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kinerja non-finansial.

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 ada 3 indikator dalam pengukuran kinerja yaitu masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Indikator tersebut dapat dijabarkan dalam konsep pengukuran kinerja yang disebut *value for money*.

2.1.5.2 Konsep Value For Money

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009:4). Adapun yang dimaksud dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yaitu:

1. Ekonomi

Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Efisiensi

Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3. Efektivitas

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

2.2 Penelitian Terdahulu

Auditya dkk (2013) meneliti tentang analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitiannya adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Juliana (2013) meneliti tentang pengaruh pelaksana *good governance* terhadap kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, hasil yang didapatkan adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan *good governance* dengan kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Apriani (2015) meneliti tentang pengaruh *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja organisasi dilihat dari persepsi pegawai (studi kasus pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman). Hasil penelitian ini adalah *good governance* dan pengendalian internal mempengaruhi kinerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.

Nugraha (2015) telah meneliti pengaruh penerapan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan hasil bahwa penerapan *good governance* berpengaruh secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Kinerja pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh penerapan *good governance* sebesar 70,9% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

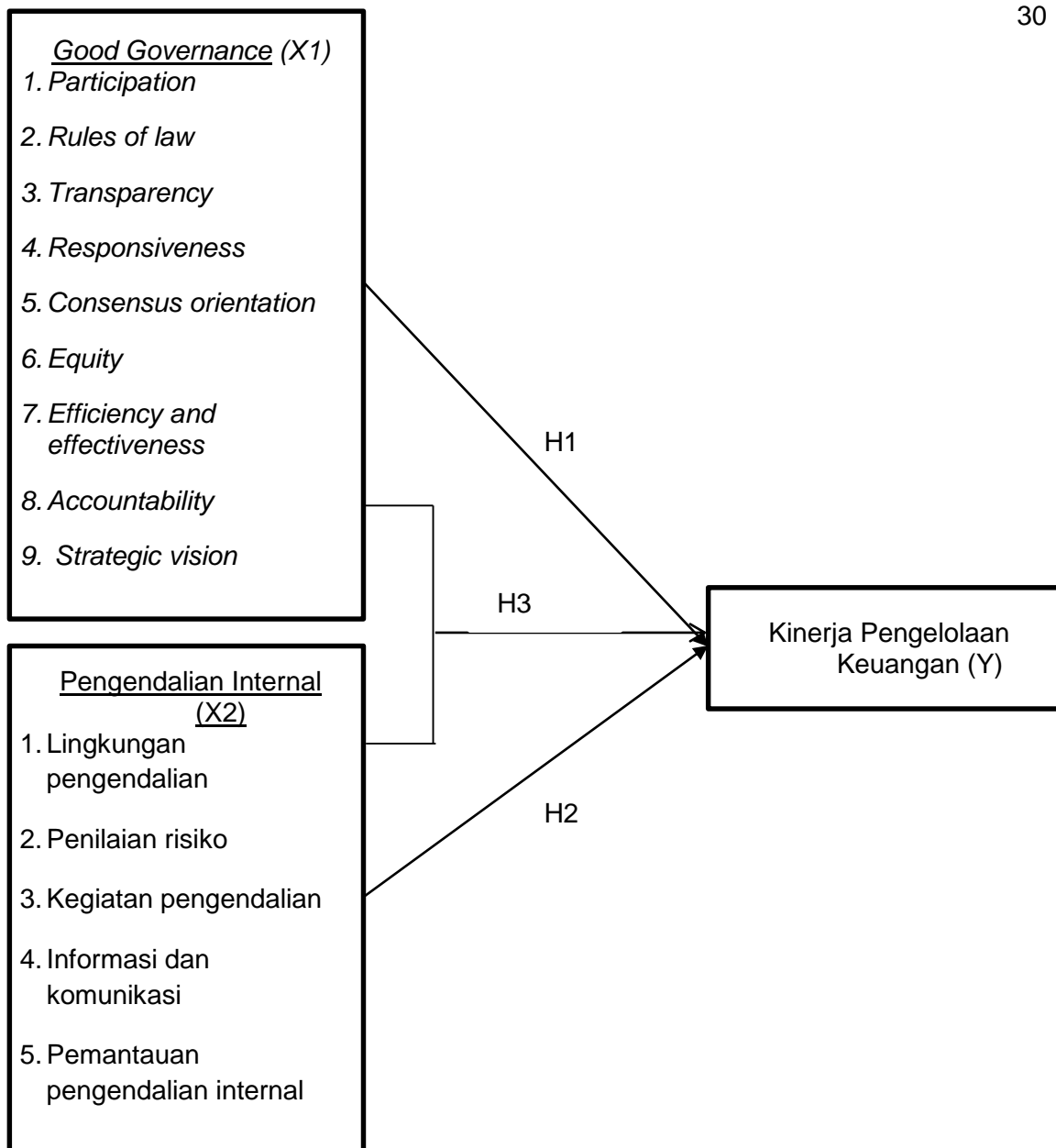
2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya, perlu dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang sesungguhnya adalah

terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparat/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan *good governance*. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakan citra pemerintah yang sampai saat ini dianggap masih sangat rendah. Dengan tingkat penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintah daerah pun akan tercapai dengan baik.

Pengendalian Internal sebuah organisasi memiliki keterkaitan yang kuat dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan suatu organisasi. Dengan adanya berbagai indikator ini diharapkan kinerja dari organisasi bisa berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan pelayanan publik yang baik. Namun, kontras yang terjadi di lapangan adalah banyaknya masalah yang dihadapi terkait kinerja pegawai.

Adanya keterkaitan antara *good governance* dan pengendalian internal dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan teori atribusi yang dimana teori tersebut menyatakan bahwa suatu perilaku dapat berubah diakibatkan oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Keterkaitan kedua variabel mengindikasikan terkait faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi suatu kinerja. Hal ini dapat dikemukakan bahwa indikator *good governance* dan pengendalian internal dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan daerah di Kota Makassar seperti yang terlihat digambar berikut ini:



Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut.

1. Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

United Nation Development Programme (UNDP) telah menjelaskan bahwa prinsip-prinsip good governance yaitu terdiri dari *participation, rules of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness*

and efficiency, accountability, dan strategic vision. Untuk dapat menjadi pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik, maka indikator – indikator *good governance* harus dapat dilaksanakan dalam lingkup kinerja pemerintah daerah. Hal ini didukung pula oleh teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku kinerja dapat berubah karena adanya faktor internal maupun eksternal dan *good governance* adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah khususnya pengelolaan keuangan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rifka (2013) dan Hardi (2015) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan *good governance* dan kinerja pemerintah daerah. Sehingga hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

H1 : Penerapan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan daerah

2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan berlaku. Adanya pengendalian internal dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana indikator yang ada di dalam pengendalian internal ini dapat mempengaruhi suatu kinerja pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah. Hal ini didukung pula oleh teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku kinerja dapat berubah karena adanya faktor internal maupun eksternal dan pengendalian internal adalah faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah khususnya pengelolaan keuangan.

Penelitian yang terkait dengan pengendalian internal adalah oleh Apriani (2015) yang menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman dan juga penelitian oleh Miswaty (2015) yang menemukan bahwa pengendalian internal secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi di Balikpapan. Sehingga hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

H2 : Penerapan Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan daerah

3. Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Tercapainya suatu tujuan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari unsur – unsur eksternal ataupun internal yang terlaksana dalam suatu tindakan atau aktivitas. Unsur – unsur ini bisa jadi adalah *good governance* dan pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan berlaku. Untuk dapat menjadi pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik, maka indikator – indikator *good governance* juga harus dapat dilaksanakan dalam lingkup kinerja pemerintah daerah. Adanya *good governance* dan pengendalian internal dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana indikator yang ada di dalam *good governance* dan pengendalian internal secara simultan dapat mempengaruhi suatu kinerja pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah. Hal ini didukung pula oleh teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku kinerja dapat berubah karena adanya faktor internal maupun eksternal.

Penelitian yang terkait adalah oleh Sari (2015) yang menemukan bahwa *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman dan juga penelitian oleh Yuliani (2015) yang menemukan bahwa secara simultan *good governance* dan pengendalian internal mempengaruhi kinerja organisasi di Balikpapan. Sehingga hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

H3 : Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian dirancang sebagai penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausal berguna untuk mengukur hubungan antara variabel riset, atau untuk menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya (Umar, 2003). Peneliti menggunakan desain penelitian untuk mengetahui apakah penerapan *good governance* dan pengendalian internal sebagai variabel independen memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Kota Makassar sebagai variabel dependen. Penelitian ini menekankan pada pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*), uji reliabilitas, uji validitas, uji t, dan uji f.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lingkup pemerintahan Kota Makassar. Makassar adalah sebuah ibu kota provinsi yang dibatasi oleh Kabupaten Maros di sebelah utara, Selat Makassar di sebelah Barat, Kabupaten Maros di sebelah timur, dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Luas wilayah Kota Makassar tercatat 181,35 Km², yang secara administratif terbagi dalam 143 Desa / Kelurahan dan 14 Kecamatan. Selain itu lingkup pemerintahan kota Makassar memiliki 54 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2016.

3.3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2009:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar dengan jumlah SKPD sebanyak 54 yang terdiri atas 14 Kecamatan, 16 organisasi berbentuk Dinas, 10 organisasi berbentuk Kantor, dan 14 organisasi berbentuk Badan.

Sampel merupakan sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2006). Pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada *purpose sampling*. Berdasarkan hal tersebut sampel dalam penelitian ini diambil pada 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jumlah 45 responden yang dimana tiap SKPD diambil 3 orang yang terdiri dari Pimpinan SKPD, Bendahara, dan Staf Keuangan (Kepala Bagian atau Anggota).

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa jenis data subjektif yang diperoleh berupa opini, sikap, pengalaman, dan karakteristik dari responden yang menjadi subjek penelitian. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban responden terhadap item-item pernyataan yang terdapat dalam instrumen penelitian, yaitu variabel pertama penerapan *good governance* yang diukur dengan indikator *participation, transparency, rule of law, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability*, dan *strategic vision*. Variabel kedua penerapan pengendalian internal yang diukur dengan indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko,

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern serta variabel kinerja pengelolaan pemerintah daerah yang diukur dengan indikator *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektifitas).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer, yang berupa persepsi para responden terhadap variabel – variabel yang digunakan. Modus komunikasi untuk memperoleh data dari responden dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner yang diberikan berisi sejumlah pernyataan yang akan dibagikan kepada responden. Setiap kuesioner yang didistribusikan kepada para responden disertai surat permohonan pengisian kuesioner.

Adapun kuesioner dalam penelitian ini mendefinisikan operasional variabel ke dalam indikatornya, selanjutnya indikator tersebut dijabarkan ke dalam bentuk pernyataan, dan kemudian pemberian skor atas jawaban dari responden atas pernyataan-pernyataan yang ada. Untuk menentukan skor pada penelitian ini peneliti menggunakan skala *likert*.

Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009:107). Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden jawaban harus menggambarkan, mendukung pernyataan atau tidak mendukung pernyataan.

Pemberian skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Skala Penilaian Untuk Pernyataan Positif

No	Jenis Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5

Lanjutan Tabel 3.1

No	Jenis Jawaban	Skor
2	Setuju	4
3	Ragu-Ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat tidak setuju	1

Sumber: Sugiyono (2009:87)

3.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1. Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada suatu nilai (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, digunakan dua macam variabel penelitian.

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Pada penelitian yang menjadi variabel independen adalah *good governance* dan pengendalian internal.

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang memengaruhi variabel lain baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Adapun yang menjadi variabel dependen yang mempunyai hubungan dengan penerapan *good governance* dan pengendalian internal yaitu kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Makassar.

3.6.2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas variabel yang diamati. Secara tidak langsung, definisi operasional itu mengacu pada

bagaimana mengukur suatu variabel. Definisi operasional pada penelitian ini terdiri dari sub variabel sebagai berikut:

1. Variabel penerapan *good governance* adalah konsep tata kelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. *Good governance* dalam penelitian ini menekankan pada faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah daerah dalam hal ini kinerja pengelolaan keuangan daerah. *Good governance* diukur berdasarkan indikatornya yaitu:

- a. *Participation*

Partisipasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengikutsertakan masyarakat dalam membuat kebijakan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pemerintahan sehingga dalam proses pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan indikator tersebut.

- b. *Rule of law*

Rule of law yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah memberlakukan hukum yang telah dibuat kepada seluruh lapisan masyarakat dan menegakkan hukum dengan baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah pengelolaan yang harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan memiliki informasi yang dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat.

- c. *Transparency*

Transparansi dalam penelitian ini adalah mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan praktek terbaik untuk memastikan kualitas laporan keuangan mempublikasikan informasi

keuangan dan informasi lain yang material dan berdampak signifikan pada kinerja pemerintah daerah khususnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.

d. *Responsiveness*

Responsiveness dalam penelitian ini adalah cepat dan tanggap serta memberikan pelayanan yang baik kepada pihak yang berkepentingan.

e. *Consensus orientation*

Consensus orientation dalam penelitian ini adalah membuat kebijakan dengan memperhatikan kepentingan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan. Informasi yang didapatkan dalam pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan kepentingan orang lain.

f. *Equity*

Equity dalam penelitian ini adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memperbaiki, dan mempertahankan kesejahteraan mereka lewat informasi yang dihasilkan dari kinerja pengelolaan keuangan tersebut.

g. *Efficiency and effectiveness*

Efisiensi dan efektifitas dalam penelitian ini adalah mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan membuahkan hasil yang baik. Efektifitas yang dimaksud adalah pencapaian tujuan tanpa mepedulikan biaya yang akan dikeluarkan dan efisiensi adalah pencapaian target dengan menggunakan input (biaya) untuk menghasilkan output yang besar. Laporan keuangan yang dibuat

harus memiliki prinsip efisien dan efektif sehingga kualitas laporan itu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

h. Accountanbility

Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah.

i. Strategic vision

Strategic Vision dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki visi misi jauh kedepan sehingga dalam melaksanakan kinerja pengelolaan keuangan harus memiliki tujuan yang telah dibuat secara mapan dan berguna untuk entitas terkait.

2. Variabel pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan berlaku. Pengendalian internal dalam penelitian ini menekankan pada perencanaan dan pengendalian yang telah disiapkan dimana memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Pengendalian internal sangat penting dalam proses kinerja pengelolaan keuangan daerah karena aktifitas yang ada memiliki hubungan erat dengan aktifitas keuangan dan sebagainya. Pengendalian internal dapat diukur berdasarkan indikatornya yaitu:

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian dalam penelitian ini adalah pimpinan instansi pemerintahan terutama pemerintahan daerah wajib

menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerja sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam kinerja organisasi salah satunya kinerja pengelolaan keuangan.

b. Penilaian risiko

Penilaian risiko dalam penelitian ini adalah pimpinan Instansi pemerintah daerah wajib melakukan penilaian risiko. Adapun penilaian risiko yang dimaksud meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko yang mungkin didapatkan ketika kinerja organisasi sedang berlangsung.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian dalam penelitian ini adalah pimpinan instansi pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan dalam hal ini kinerja pengelolaan keuangan daerah.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi dalam penelitian ini adalah pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

e. Pemantauan pengendalian internal

Pemantauan pengendalian internal adalah pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

3. Variabel kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini adalah semua aktivitas keuangan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan yang berguna untuk pelaksanaan aktivitas keuangan tahun berikutnya. Variabel ini diukur dengan indikator *value for money* terdiri dari:

a. Ekonomi

Pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan serta pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Indikator ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

b. Efisiensi

Suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan ini tidak menggunakan banyak dana namun tujuan yang ingin dicapai dapat direalisasikan.

c. Efektifitas

Efektifitas adalah proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

3.7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS 20.0. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat. Pengertian analisis regresi linier berganda menurut Sugiyono (2010:277), adalah sebagai berikut :

“Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)”.

Persamaan analisis regresi linier secara umum untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon \quad (1)$$

Keterangan:

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi multiple variabel bebas X_1 terhadap variabel terikat Y, bila variabel bebas lainnya dianggap konstan

β_2 : Koefisien regresi multiple variabel bebas X_2 terhadap variabel terikat Y, bila variabel bebas lainnya dianggap konstan

3.8. Pengujian Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (*Reliability*) dan tingkat keabsahan (*Validity*) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.

3.8.1. Uji Validitas

Menurut Yusuf (2014: 235), validitas menunjukkan tingkat sejauh mana suatu alat pengukur mengukur apa yang ingin diukur. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas butir item instrumen penelitian ini yaitu teknik *product moment* dari Karl Pearson (validitas isi atau *content validity*). Teknik *product moment correlation* yaitu setiap skor tiap item dikorelasikan dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka data dapat dikatakan valid.

3.8.2. Uji Reliabilitas

Menurut Yusuf (2014: 242), reliabilitas adalah suatu ukuran konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen penelitian terhadap individu yang sama, dan diberikan dalam waktu yang berbeda (Ghozali, 2006). Pengujian reliabilitas menggunakan *cronbach alpha*. Suatu alat dikatakan handal jika nilai *cronbach alpha* $> 0,60$. Perhitungan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 20.00.

3.9. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Sunyoto, 2011:84). Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi. Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan uji *one-sample Kolmogorov-smirnov*. Pengambilan keputusan dengan analisis grafik

yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normal *probability plot*. Uji normal probability plot dikatakan berdistribusi normal jika garis data rill mengikuti garis diagonal dan cara ini dianggap lebih handal daripada grafik histogram karena cara ini membandingkan data rill dengan data distribusi normal (Sunyoto, 2011:89). Sementara untuk uji *Kolmogorov-Smirnov* dikatakan berdistribusi normal jika *asymptotic significan* data lebih besar daripada 0.05 ($p > 0.05$) (Sufren, 2013:68).

3.9.1. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas digunakan untuk menguji apakah sampel terdistribusi dengan normal atau tidak, juga untuk menghindari bias. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji P-Plot Normality, yaitu dengan menetapkan derajat keyakinan ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria pengujiannya jika sebaran data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi berdistribusi normal, sedangkan jika sebaran data jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2006).

3.9.2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mencari tahu apakah kesalahan (*errors*) suatu data pada periode tertentu berkorelasi dengan periode lainnya (Sufren, 2013:108). Model regresi yang baik adalah tidak mengalami autokorelasi. Cara untuk mengetahui apakah suatu model regresi mengalami autokorelasi atau tidak dengan mengecek nilai Durbin-Watson (DW). Syarat untuk tidak terjadi autokorelasi adalah $1 < DW < 3$ (Sufren, 2013:109).

3.9.3. Uji Heteroskedastisitas

Priyatno (2010: 83), mengemukakan bahwa uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya heteroskedastisitas.

Untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas ini dilakukan melalui metode scatter plot, yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada scatter plot. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau apabila tingkat probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

3.9.4. Uji Multikolinearitas

Priyatno (2010: 8), mengemukakan bahwa uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Menurut Santoso (2004), Apabila VIF lebih kecil dari 0,01 atau lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya tidak terjadi multikolinearitas antar variabel jika nilai VIF berada pada kisaran 0,10 sampai 10.

3.10. Pengujian Hipotesis

3.10.1 Uji – F

Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya :

1. $H_0 : b_1 = 0$, artinya semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen,
2. $H_a : b_2 \neq 0$, artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima atau H_0 ditolak,

Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak atau H_0 diterima.

3.10.2 Uji – t

Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan seberapa besar jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah :

- 1) $H_0 : b_1 = 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen,
- 2) $H_a : b_2 \neq 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_a atau H_0 ditolak,

Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak atau H_0 diterima

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *Good Governance* di pemerintah Kota Makassar telah diterapkan dengan baik. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah yang tertuang dalam kebijakan umum pembangunan Kota Makassar yaitu mengefektifkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* diterapkan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sehingga tujuan SKPD dapat terwujud. Indikator yang paling kuat berpengaruh dalam pembentukan *good governance* adalah akuntabilitas, dapat dilihat seluruh SKPD memperhatikan indikator ini dalam pembuatan anggaran maupun laporan keuangan. Indikator yang memiliki pengaruh kurang kuat dalam pembentukan *good governance* adalah partisipasi, dapat dilihat bahwa masyarakat cenderung belum aktif berperan dalam pelaksanaan kinerja pengelolaan keuangan sehingga berpengaruh dalam kinerja SKPD. Hal ini sesuai dengan pernyataan teori atribusi yang menyatakan perilaku seseorang dapat berubah karena adanya pengaruh internal atau eksternal yang diterapkan dan *good governance* sendiri merupakan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan dari sisi pelaksanaan kegiatannya.

2. Penerapan pengendalian internal di pemerintah Kota Makassar diterapkan dengan baik. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan SKPD terhadap masyarakat dalam pencapaian tujuan organisasi publik. Pengendalian internal sendiri mendorong dan memotivasi pegawai SKPD untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya agar tujuan instansi dapat tercapai. Indikator yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pengendalian internal adalah informasi dan komunikasi, dimana segala informasi dan komunikasi menyebar secara cepat dan tepat. Indikator yang memiliki pengaruh kurang kuat dalam membentuk pengendalian internal adalah kegiatan pengendalian itu sendiri, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan teori atribusi yang menyatakan perilaku seseorang dapat berubah karena adanya pengaruh internal atau eksternal dan pengendalian internal sendiri merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan dari sisi pelaksanaan pengendaliannya.
3. Penerapan good governance dan pengendalian secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Makassar. Kinerja pengelolaan keuangan memiliki wilayah kerja yang cukup luas dan teliti sehingga perlu adanya good governance untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan sesuai dengan tata kelola yang seharusnya dan adanya pengendalian internal untuk melihat sejauh mana tujuan dari SKPD dapat tercapai dan sesuai dengan sop yang tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan teori atribusi yang menyatakan perilaku seseorang dapat berubah karena adanya pengaruh internal atau eksternal , sehingga good governance dan pengendalian

internal sendiri merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan dari sisi pelaksanaan kegiatan dan pengendaliannya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Dalam mengefektifkan penerapan *good governance* di Pemerintah Kota Makassar, peran aparatur pemerintah daerah juga dimaksimalkan untuk turut menganut prinsip-prinsip *good governance* secara individu maupun kelompok, terutama dalam prinsip – prinsip yang berhubungan dengan kinerja pengelolaan keuangan seperti transparansi, akuntabilitas, responsif, dan efektifitas serta efisiensi.
2. Peran pengendalian internal harus dilakukan secara cermat dan tepat karena menyangkut dengan tujuan yang akan dilakukan selama periode tertentu, hal ini harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel – variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan bisa mengambil sampel yang lebih representatif.

5.3. Keterbatasan Penelitian

1. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, penelitian ini hanya meneliti pada SKPD sehingga hasilnya hanya mencerminkan kondisi yang ada pada SKPD tersebut dan tidak dapat digeneralisasi pada semua keadaan.

2. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi jawaban melalui kuesioner yang diberikan sehingga kadang timbul perbedaan interpretasi atas maksud dan tujuan pernyataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Asian Development Bank.1999, Governance : Sound Development Management, Artikel: "Public Administration in the 21-st Century".
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Boynton, W.G. Kell and R.N. Johnson. 2001. *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh Jilid I. Terjemahan oleh Paul A. Rajoe, Gina Gania dan Ichsan Setiyo Budi. 2002. Jakarta: Erlangga.
- Dasaratha, Frederick, & Rama. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Ester ,Juli. 2009. *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip – Prinsip Good Governance Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar.
- Gaspersz, Vincent. 2002. *Total Quality Management*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, Imam. 2006. *Statistik Nonparametrik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halla, Yusriadi. 2013. *Pengaruh Good Governance, Kualitas Komunikasi, Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Hardi Nugraha. 2015. *Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- James B. Whittaker dalam BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 2000. *Kinerja Organisasi Publik*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Krina P, L.L.2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- Lucy, Husaini, dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairnees* Volume 3, Nomor 1, 2013: 21-41.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manurung, J.J., Adler Haymans Manurung, Ferdinand Dehoutman Saragih. 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi 6. Salemba Empat, Jakarta.
- Ningsih, dwi. 2013. Pengendalian Internal menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission). (<http://dwipuspaningsih511.blogspot.com/2013/04/pengendalian-internal-menurut-coso.html> diakses tanggal 4 November 2015).
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Pratiwi, Diana. 2013. Hubungan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Depok: Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.
- Pratolo, Suryo. 2006. Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Manajer pada Organisasional, Pengendalian Intern terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Rifka, Juliana. 2013. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Robertson, Gordon. (2002). "Review Kinerja". Lokakarya Review Kinerja. BPKP dan executive Education.

- Robbins, S.T.2003. Perilaku Organisasi. Terjemahan Ahmad Fausi, 2006. Klaten: Indeks.
- Rohman, Arif. 2009. Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta.
- Santosa, Panji. 2008, Administrasi Publik : Teori Dan Aplikasi Good Governance, Bandung : Refika Aditama.
- Simangunsong, Rosma. 2014. "The Impact of Internal Control Effectiveness and Internal Audit Role toward the Performance of Local Government". Research Journal of Finance and Accounting. Vol. 5 (2014). No. 7: 50-58.
- Santoso, Singgih. 2004. Menguasai Statistik di Era Informasi Dengan SPSS 14. PT. ELEX Media Komputindo: Jakarta.
- Sari Apriani. 2013. Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Organisasi Dilihat dari Persepsi Pegawai. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Sufren dan Yonathan.N. 2013. Mahir Menggunakan SPSS secara Otodidak. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2011. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Jakarta: CAPS.
- Supriadi., Zulkarnaen., dan Rusdiono.2012. Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Pontianak: Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
- Sekaran, U. 2006. Research Methods for Business (Buku 2), Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sunjuyo, dkk. 2013. Aplikasi SPSS untuk Smart Riset. Alfabeta: Bandung.
- Soleman. 2007. Kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Tjahjanulin, Domai. 2002. Reinveting Keuangan Daerah. Jurnal Administrasi Negara, Volume 2 Nomor 2. Malang: Universitas Brawijaya.
- Trisnaningsih, Sri. 2007. Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Corporate Governance, Gaya

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor, Jawa Timur: Simposium Nasional Akuntansi X.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UNDP. 1997. Governance for Suitable Development – A Policy Document. New York: UNDP.

UNDP. 1999. UNDP and Governance: Experiences and Lesson Learned, Lesson Learned Series No. 1. New York: UNDP Management Development and Governance Division.
(<ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/other/undp/governance/lessonslearned-e.pdf>, diakses pada 1 November 2015).

Umar, Husein, 2003, Metode Riset Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta :Politeknik Pos Indonesia.

Widodo, Joko. 2001. Good governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.

World Bank. 2008. Mengoptimalkan Kontribusi Desentralisasi Bagi Pembangunan: Metodologi Kerangka Kerja Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (LGPM). Washington, DC: World Bank. (<http://web.worldbank.org>, diakses pada 5 November 2015).

Yusuf, Dedy Somantri. 2009. Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung. Bandung: Jurusan Akuntansi.

Yusuf, A Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group

<http://www.makassarkota.go.id/berita-275-kesiapsiagaan-bencana-kota-makassar.html> (diakses pada tanggal 4 November 2015)

<https://andichairilfurqan.wordpress.com/2012/05/25/kinerja-pengelolaan-keuangan-negara-daerah/> (diakses pada tanggal 4 November 2015)

<http://www.antarasulsel.com/berita/60855/bpk-sulsel-beberkan-kesulitan-daerah-raih-wtp> (diakses pada tanggal 4 November 2015)

<http://rakyatku.com/2015/08/25/news/endre-haidar-kompak-puji-sistem-pengaduan-pemkot-makassar.html> (diakses pada tanggal 28 Februari 2016)

<http://antarasulsel.com/berita/57250/pemkot-makassar-telkom-implementasikan-program-smart-city> (diakses pada tanggal 28 Februari 2016)

LAMPIRAN

Lampiran I**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Karlina Ghazalah Rahman
 Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 3 November 1994
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Abd. Dg. Sirua Lr. 7B No. 35 Makassar
 No. Telepon : 085696294600
 Email : karlinakana@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Aisyah BP Wetan Gresik (Tahun 1999 – 2000)
2. Madrasah Ibtidaiyah Gresik (Tahun 2000 – 2001)
3. SD Negeri Sudirman II Makassar (Tahun 2002 – 2006)
4. SMP Negeri 8 Makassar (Tahun 2006 – 2009)
5. SMA Negeri 5 Makassar (Tahun 2009 – 2012)
6. S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin (Tahun 2012 - 2016)

Riwayat Organisasi dan Kerja**Pengalaman Organisasi**

1. Fiery (English Club) SMA Negeri 5 Makassar
2. Departemen Kemedsos Ikatan Mahasiswa Akuntansi Periode 2014-2015
3. Bendahara Umum Forum Studi Ekonomi Islam (FoSEI) Unhas Periode 2014-2015
4. Reporter Media Ekonomi (Medkom) Unhas

Pengalaman Kerja / Magang

1. Magang Gelombang 4 Bank Indonesia (Tahun 2015)

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 16 Mei 2016

Karlina Ghazalah Rahman

Lampiran II : KUESIONER PENELITIAN**PENGANTAR KUESIONER**

Perihal : Permohonan Pengisian

Kuesioner Lampiran : Satu Berkas

**Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan
Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Daerah di Kota Makassar**

Dengan hormat,

Terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara/i untuk berpartisipasi dalam mengisi dan menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini. Penelitian ini digunakan untuk menyusun skripsi dengan judul “PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA MAKASSAR”.

Untuk itu diharapkan para responden dapat memberikan jawaban yang sebenar-benarnya demi membantu penelitian ini. Atas waktu dan kesediaannya saya ucapkan terima kasih, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Hormat Saya

KARLINA GHAZALAH R.

KUESIONER PENELITIAN

Demografi Responden

Nama Instansi	:	
Nama Responden	:	
Tanggal Pengisian	:	
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki / Perempuan
Latar Belakang Pendidikan :		Ekonomi / Akuntansi Hukum Teknik Sosial Lainnya
Pendidikan Terakhir	:	SLTA/Sederajat Diploma (D3) Strata 1 (Sarjana) Strata 2 (Master) Strata 3 (Doktor)
Jabatan	:	Kepala Badan/Dinas/Instansi Sekretaris/Kabid/Kabag Kasubid/Kasubbag/Kasubdis/Kasie Staf
Lama Bekerja	:	1 – 5 tahun 6 – 10 tahun 11 – 15 tahun 16 – 20 tahun ≥ 21 tahun

Daftar Pernyataan Penelitian

Terimakasih Bapak/Ibu, telah berkenaan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pernyataan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda (X).

Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 5, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pertanyaan/pernyataan.

Keterangan	(STS) Sangat Tidak Setuju	(TS) Tidak Setuju	(R) Ragu- ragu	(S) Setuju	(SS) Sangat Setuju
Skor	1	2	3	4	5

Penerapan *good governance*

	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	R (3)	S (4)	SS (5)
	Partisipasi (<i>Participation</i>)					
1	Masyarakat memperoleh data dan informasi untuk memberikan bahan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah daerah					
2	Pihak SKPD memiliki peran aktif dalam proses penyusunan anggaran mulai dari memberikan pendapat dan kritik					
	Kepastian Hukum (<i>Rule of Law</i>)					
3	Peraturan Daerah dan kebijakan publik lainnya disusun demi kepentingan masyarakat					

4	Pemerintah daerah menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah dan telah dilaksanakan tanpa diskriminasi dan adanya benturan kepentingan					
	Transparansi (<i>Transparency</i>)					
5	Dalam menyusun anggaran segala proses dan tahapan penyusunan dilakukan secara tertib, aman, dan terbuka					
6	Data dan informasi yang menyangkut pengelolaan keuangan dapat diperoleh oleh pengguna laporan tersebut demi kepentingan bersama					
	Responsiveness					
7	Terdapat sistem pengaduan masyarakat yang telah disusun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam hal pengelolaan keuangan.					
8	Cepat dan tanggap menindaklanjuti kritik dan saran atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat					
	Consensus Orientation					
9	Rencana kerja SKPD khususnya pengelolaan keuangan disusun berdasarkan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat					
10	Memfasilitasi forum SKPD yang membahas prioritas program dan kegiatan sebagai upaya menyempurnakan rancangan rencana kerja SKPD yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan					
	Equity					
11	Pemerintah daerah menyusun program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.					

12	Bantuan finansial maupun non finansial dapat diperoleh oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya					
	Efektifitas dan Efisiensi					
13	Tingkat keberhasilan pelaksanaan program telah sejalan dengan penyusunan anggaran dan target					
14	Penggunaan anggaran pada SKPD telah sesuai dengan alokasinya					
	Akuntabilitas (Accountability)					
15	Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dilaksanakan secara periodik melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan disampaikan tepat pada waktunya.					
16	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik harus berorientasi pada prinsip-prinsip akuntabilitas dengan menerapkan prosedur operasional standar yang berlaku.					
	Strategic Vision					
17	Pemerintah daerah menyusun visi dan misi yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>).					
18	Anggaran yang disusun dalam pengelolaan keuangan SKPD telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah					

Pengendalian Internal

	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan-tujuan jelas dan bisa dipahami dengan baik oleh semua pegawai yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan-tujuan tersebut.					
2	Ada mekanisme untuk mengidentifikasi hambatan dalam pencapaian dari tujuan instansi.					
3	Pegawai meninjau secara berkala keseluruhan fungsi dan keefektifan pengendalian.					

4	Informasi dikomunikasikan secara efektif antara bawahan, atasan dan antara biro/bagian Bapak/Ibu/Saudara/i.					
5	Evaluasi terhadap seluruh sistem pengendalian internal terlaksana.					

Kinerja Pengelolaan Keuangan

	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	R (3)	S (4)	SS (5)
1	Laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaporkan senantiasa dapat memenuhi unsur efektivitas (tepat pada waktunya) sesuai dengan aturan yang berlaku					
2	Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki manfaat umpan balik (<i>feedback value</i>) sebagai alat analisis tahun anggaran yang lalu dengan sekarang					
3	Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilaporkan senantiasa dapat memenuhi unsur kelengkapan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintahan.					
4	Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilaporkan senantiasa memenuhi unsur keteraturan dokumen pendukung transaksi keuangan yang diarsipkan.					
5	Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilaporkan senantiasa memiliki manfaat prediktif yang dapat digunakan untuk bahan analisis anggaran tahun berikutnya.					
6	Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilaporkan senantiasa dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya					
7	Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilaporkan senantiasa memenuhi unsur efisiensi karena proses pembuatan laporan menggunakan sistem komputerisasi dengan sumberdaya manusia yang berkompeten					

8	Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilaporkan senantiasa memenuhi unsur kebenaran terutama dalam hal jumlah/angka-angkanya yang dapat menghasilkan kualitas informasi yang baik					
---	--	--	--	--	--	--

Lampiran III : Hasil Uji Validitas (Output SPSS)

Variabel *Good Governance* (X1)

[illegible]

[illegible]

p13	Pearson Correlation	,139	,374*	,111	,226	,057	,165	,147	,288	-,040	,410**	,360*	,243	1	,444**	,311*	,503**	,555**
	Sig. (2-tailed)	,364	,011	,467	,136	,708	,279	,335	,055	,794	,005	,015	,108		,002	,037	,000	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
p14	Pearson Correlation	,085	,276	,111	,328*	,057	,292	,357*	,108	,060	,264	,441**	,336*	,444**	1	,311*	,335*	,555**
	Sig. (2-tailed)	,577	,067	,467	,028	,708	,052	,016	,481	,696	,080	,002	,024	,002		,037	,024	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
p15	Pearson Correlation	,323*	,068	,040	,027	,228	,185	,040	-,036	-,023	,278	,348*	,170	,311*	,311*	1	,233	,459**
	Sig. (2-tailed)	,030	,658	,796	,860	,132	,224	,794	,817	,879	,065	,019	,265	,037	,037		,123	,002
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
p16	Pearson Correlation	-,064	,509**	,056	,309*	,207	,259	,077	,271	,094	,461**	,312*	,194	,503**	,335*	,233	1	,577**
	Sig. (2-tailed)	,674	,000	,715	,039	,173	,086	,613	,072	,540	,001	,037	,201	,000	,024	,123		,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Good Governance	Pearson Correlation	,436**	,468**	,359*	,541**	,510**	,717**	,368*	,338*	,314*	,575**	,460**	,459**	,555**	,555**	,459**	,577**	1
	Sig. (2-tailed)	,003	,001	,015	,000	,000	,000	,013	,023	,036	,000	,001	,002	,000	,000	,002	,000	
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Pengendalian Internal (X2)

		Correlations					Pengendalian Internal
		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	
x2.1	Pearson Correlation	1	,432**	,082	,451**	,210	,649**
	Sig. (2-tailed)		,003	,591	,002	,167	,000
	N	45	45	45	45	45	45
x2.2	Pearson Correlation	,432**	1	,245	,427**	,174	,700**
	Sig. (2-tailed)	,003		,105	,003	,254	,000
	N	45	45	45	45	45	45
x2.3	Pearson Correlation	,082	,245	1	,217	,076	,560**
	Sig. (2-tailed)	,591	,105		,152	,620	,000
	N	45	45	45	45	45	45
x2.4	Pearson Correlation	,451**	,427**	,217	1	,339*	,740**
	Sig. (2-tailed)	,002	,003	,152		,023	,000
	N	45	45	45	45	45	45
x2.5	Pearson Correlation	,210	,174	,076	,339*	1	,553**
	Sig. (2-tailed)	,167	,254	,620	,023		,000
	N	45	45	45	45	45	45
Pengendalian Internal	Pearson Correlation	,649**	,700**	,560**	,740**	,553**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)

		Correlations								Kinerja Pengelolaan Keuangan
		y1.1	y1.2	y1.3	y1.4	y1.5	y1.6	y1.7	y1.8	
y1.1	Pearson Correlation	1	,410**	,046	,338*	,100	,023	,315*	,155	,541**
	Sig. (2-tailed)		,005	,766	,023	,513	,883	,035	,308	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
y1.2	Pearson Correlation	,410**	1	,083	,136	,149	-,047	,328*	,324*	,504**
	Sig. (2-tailed)	,005		,586	,374	,328	,758	,028	,030	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
y1.3	Pearson Correlation	,046	,083	1	,229	,410**	-,171	,248	,389**	,493**
	Sig. (2-tailed)	,766	,586		,131	,005	,262	,100	,008	,001
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
y1.4	Pearson Correlation	,338*	,136	,229	1	,581**	,316*	,062	,049	,665**
	Sig. (2-tailed)	,023	,374	,131		,000	,034	,688	,748	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
y1.5	Pearson Correlation	,100	,149	,410**	,581**	1	,363*	,122	,493**	,766**
	Sig. (2-tailed)	,513	,328	,005	,000		,014	,426	,001	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
y1.6	Pearson Correlation	,023	-,047	-,171	,316*	,363*	1	-,150	-,021	,346*
	Sig. (2-tailed)	,883	,758	,262	,034	,014		,327	,891	,020
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
y1.7	Pearson Correlation	,315*	,328*	,248	,062	,122	-,150	1	,093	,446**
	Sig. (2-tailed)	,035	,028	,100	,688	,426	,327		,542	,002
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
y1.8	Pearson Correlation	,155	,324*	,389**	,049	,493**	-,021	,093	1	,557**

Sig. (2-tailed)		,308	,030	,008	,748	,001	,891	,542		,000
N		45	45	45	45	45	45	45	45	45
Pearson Correlation		,541**	,504**	,493**	,665**	,766**	,346*	,446**	,557**	1
Kinerja Pengelolaan Keuangan	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,020	,002	,000	
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

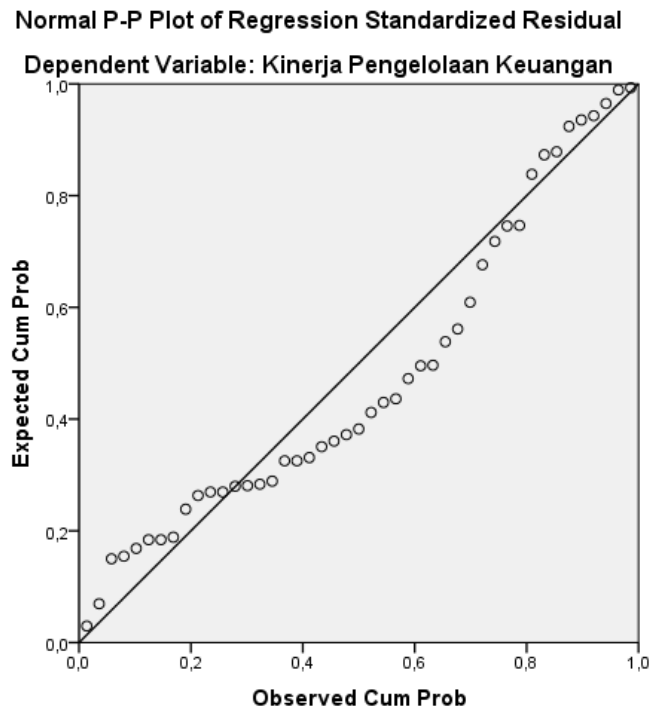
Lampiran IV : Hasil Korelasi (Output SPSS)

Variabel Independen terhadap Variabel Dependen (Parsial)

		Correlations		
		Good Governance	Pengendalian Internal	Kinerja Pengelolaan Keuangan
Good Governance	Pearson Correlation	1	,676**	,732**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	3004	3004	3004
Pengendalian Internal	Pearson Correlation	,676**	1	,651**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	3004	3004	3004
Kinerja Pengelolaan Keuangan	Pearson Correlation	,732**	,651**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	3004	3004	3004

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran V: Hasil Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Good Governance	Pengendalian Internal	Kinerja Pengelolaan Keuangan
N		45	45	45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	65,9778	20,9778	33,9333
	Std. Deviation	4,83589	1,64440	2,32965
	Absolute	,083	,206	,189
Most Extreme Differences	Positive	,083	,206	,189
	Negative	-,057	-,165	-,082
Kolmogorov-Smirnov Z		,557	1,380	1,268
Asymp. Sig. (2-tailed)		,916	,044	,080

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran VI: Hasil Uji Autokorelasi ,Multikolenieritas, dan Heteroskedastisitas

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,487 ^a	,237	,201	2,08232	1,751

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Good Governance

b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan

Uji Multikolenieritas

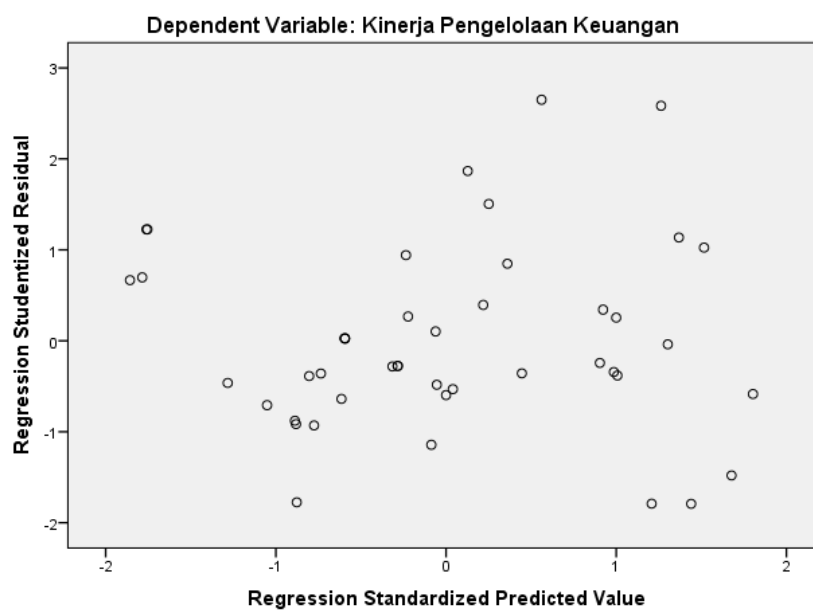
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	16,986	4,703		3,612	,001		
	Good Governance	,160	,079	,332	2,032	,049	,680	1,471
	Pengendalian Internal	,305	,232	,215	1,317	,195	,680	1,471

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan

Ui Heteroskedastisitas

Scatterplot



Lampiran VI: Hasil Jawaban Responden

Good Governance (X1)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Total
1	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	3	71
2	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	71
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	68
4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	78
5	5	5	4	4	3	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	64
6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	67
7	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	67
8	3	4	3	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	69
9	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	69
10	2	5	4	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	3	5	68
11	2	5	4	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	3	5	68
12	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	60
13	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	77
14	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	65
15	4	5	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4	5	4	4	5	67
16	4	4	5	4	3	4	4	4	5	3	4	5	4	4	3	4	64
17	4	5	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	63
18	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	70
19	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	70
20	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	70
21	3	5	5	5	5	3	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	70
22	3	4	5	4	4	2	4	5	4	3	3	3	4	4	4	4	60
23	4	4	5	4	4	3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	64
24	4	4	5	5	4	3	4	3	4	4	5	4	4	4	5	4	66
25	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	62
26	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	73

27	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	60
28	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	70
29	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	79
30	2	5	3	5	3	2	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	61
31	4	4	5	4	4	3	4	4	3	5	4	4	5	4	4	5	66
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
33	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	72
34	1	5	2	4	1	3	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	64
35	3	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	5	4	4	3	4	63
36	4	4	5	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	59
37	4	4	3	3	4	4	5	4	4	2	4	4	4	4	4	3	60
38	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	5	67
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	78
40	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	71
41	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	67
42	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	54
43	4	3	4	5	4	4	4	5	5	4	3	4	4	4	5	4	66
44	4	4	3	4	5	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	63
45	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	59

Lanjutan Lampiran VI : Hasil Jawaban Responden

Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)									Pengendalian Internal (X2)					
1	2	3	4	5	6	7	8	Total	1	2	3	4	5	Total
4	4	5	4	5	4	5	5	36	4	5	5	5	5	24
4	4	5	4	4	4	5	4	34	3	4	5	5	4	21
3	3	5	5	5	5	3	5	34	5	4	4	5	5	23
5	4	4	5	5	5	5	5	38	5	5	5	5	5	25
2	4	4	3	4	4	4	4	29	5	4	4	5	4	22
4	4	4	5	4	5	4	4	34	4	4	4	4	4	20
5	4	4	5	4	5	4	4	35	5	5	5	5	4	24
4	3	4	4	4	4	5	4	32	5	3	4	4	4	20
4	4	5	5	5	4	4	4	35	5	4	4	4	4	21
4	4	5	3	4	3	5	5	33	5	4	4	5	5	23
4	4	5	3	4	3	5	5	33	5	4	4	5	5	23
4	4	3	4	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	20
5	4	4	5	5	5	5	4	37	5	5	5	5	4	24
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	3	4	4	4	19
4	4	4	5	5	4	4	5	35	4	4	3	4	5	20
4	4	4	5	5	4	4	5	35	4	3	4	5	5	21
4	4	4	3	4	5	3	5	32	4	4	4	3	4	19
4	4	4	4	4	4	4	5	33	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	4	5	33	4	4	4	4	4	20
4	4	5	5	5	4	4	5	36	4	3	3	4	4	18
4	4	5	5	5	4	4	5	36	4	4	4	5	4	21
4	4	5	5	5	4	4	5	36	4	3	3	4	4	18
4	4	4	5	4	4	5	3	33	4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	4	4	5	33	4	4	5	4	4	21
4	4	4	4	4	4	3	4	31	4	4	3	4	4	19
4	5	4	4	4	4	5	5	35	5	4	4	5	4	22
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	4	5	34	5	4	5	5	4	23
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	4	5	4	33	4	4	3	5	5	21
5	4	4	4	4	4	4	4	33	5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	4	3	4	5	34	5	4	4	4	5	22
5	5	5	5	4	2	5	5	36	5	5	2	5	4	21
4	4	4	4	3	4	4	4	31	4	4	4	4	4	20
4	4	4	3	3	4	4	4	30	4	4	3	4	3	18
4	4	4	4	5	4	4	4	33	4	4	4	4	4	20
4	5	4	5	5	5	5	5	38	5	5	4	5	5	24
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	25
4	5	4	4	5	5	4	5	36	4	4	4	5	5	22
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	20

4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	5	21
4	4	4	3	4	4	5	5	33	4	3	3	4	5	19
4	4	4	5	4	4	4	4	33	4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	3	4	4	3	30	4	4	3	4	3	18